

Anggap Kinerja Belum Maksimal

Dua Tahun Ganjar-Heru

SEMARANG - Belasan warga masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Tengah, Senin (31/8) kemarin mendatangi kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Mereka mendesak anggota DPRD setempat menggunakan hak legislatifnya untuk mengawal kinerja Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rangka merealisasikan program eksekutif yang prorakyat.

"Visi dan misi gubernur dengan slogan *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi* ternyata belum maksimal. Itu adalah hasil evaluasi kami terhadap kinerja selama menjabat menjadi gubernur dalam dua tahun ini," ujar perwakilan warga Moch Safik saat melakukan audiensi di ruang rapat pimpinan dewan. Mereka ditemui Ketua Fraksi PDIP DPRD Jateng Nuniek

Sriyuningasih, anggota Komisi B Messy Widiastuti, anggota Komisi D Masfui, dan anggota Komisi A Amir Darmanto.

Dia menjelaskan, salah satu indikator kelemahan Ganjar adalah masih banyak ditemukannya kasus penyelewengan anggaran APBD dan hal tersebut dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014. "Selain itu, kurangnya informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait anggaran dan alokasi APBD sehingga mengakibatkan proses pengawasan dan *monitoring* anggaran sangat lemah," imbuhnya.

Dia menambahkan, program kartu tani dan kartu nelayan yang merupakan janji gubernur pada masa kampanye hingga sekarang belum berjalan sesuai yang diharapkan. Ia mencontohkan, kartu tani baru terdistribusi kurang lebih 240 buah yang didarkan kepada petani di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. "Kami menginginkan

sebelum masa jabatan gubernur habis, semuanya harus sudah terealisasi," imbuhnya seraya menunjukkan beberapa petani dan nelayan yang turut bersamanya.

Menanggapi hal tersebut, Nuniek Sriyuningasih menyatakan bahwa memang selama ini pihak eksekutif tidak mempunyai data jumlah petani di Jawa Tengah yang valid. Sehingga program kartu tani tidak berjalan dengan maksimal. Karenanya, berdasarkan rapat kerja dengan sejumlah pihak beberapa waktu lalu disepakati anggaran khusus Rp 21 miliar untuk menyempurnakan pendataan. "Sebenarnya ini bukan murni salah Pak Ganjar. Tetapi memang dari gubernur-gubernur sebelumnya tidak ada (data) yang valid," terangnya.

Nunik menambahkan, pihaknya terus mendorong program tersebut dapat selesai sebelum masa akhir kepemimpinan Ganjar pada 2018 mendatang. Jika tidak dapat merealisasikan di 35 kabupaten/kota,



AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG

MENGADU : Sejumlah warga masyarakat yang terdiri dari aktivis LSM, petani, nelayan dan buruh melakukan audiensi dengan anggota DPRD Jateng, kemarin.

setidaknya pada 16 kabupaten/kota yang menjadi lumbung padi dapat merasakan manfaat dari kartu tersebut. "Maka dari itu, begitu selesai pendataan kami langsung meminta BRI sebagai mitra untuk langsung mendistribusikannya. Akhir tahun ini selesai di Batang," tandasnya.

Messy Widiastuti, anggota

Komisi B lainnya yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menambahkan, terkait temuan BPK pihaknya telah mengundang yang bersangkutan untuk membahas bersama sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut. "Kami juga terus melakukan supervisi anggaran supaya transparan," terang politisi PDIP itu. (fai/ric/ce1)